

Diplomasi Publik: Bagaimana posisinya bagi Indonesia?

Frequency of International Relations
March, Vol 2 (1) 29-55
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : April 6, 2020
Accepted : April 11, 2020
Available On-line : Mei 14, 2020

Sofia Trisni

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas
sofi_hi01@yahoo.com

Abstract

Public diplomacy is a popular instrument used to meet the interests of the state. It claims that nowadays, nations are competed to pay attention to the implementation of public diplomacy. This article is interested in exploring the phenomenon above by research Indonesian public diplomacy to find out the position of public diplomacy for Indonesia. This article uses the literature study method concerning documents from the Ministry of Foreign Affairs website, several speeches by state officials, and journal articles. By referring to the concept of public diplomacy, the author tries to analyze the position of public diplomacy for Indonesia. The documents used as data sources in this paper indicate that public diplomacy has occupied a particular spot for Indonesia, bearing in mind that Indonesia already has a special directorate to take care of the implementation of public diplomacy. Additionally, some objectives of public diplomacy are often delivered by state officials in several of their speeches which, indicates its specialty.

Keywords: Public Diplomacy, Indonesia, Directorate of Public Diplomacy

Pendahuluan

Diplomasi Publik merupakan instrumen yang populer untuk mencapai kepentingan negara sejak lama (Rugh, 2014). Diplomasi Publik bahkan merupakan isu komunikasi politik yang paling menonjol pada abad 21 (Snow dan Taylor 2008). Pencapaian kepentingan nasional merupakan tujuan utama dari interaksi antar negara dalam kancah hubungan internasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kaum realis pada Ilmu Hubungan Internasional, hubungan antar negara tidak dapat dilepaskan dari pengamanan *power*. Secara natural, negara selalu berusaha untuk memperbesar *power* nya, untuk memastikan bahwa mereka dapat menjaga kelangsungan hidup (*survival*) negaranya. *Power* ini dikatakan memiliki dua bentuk utama, yaitu *hard power* dan *soft power*. Jika dulu negara mendapatkan *power* dengan cara yang cenderung menggunakan kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer ataupun dengan menggunakan kekuatan ekonomi melalui embargo dan bentuk lainnya (*hard power*), saat ini perlahan diplomasi publik disadari sebagai “senjata baru” yang juga dapat menghasilkan *power*. Nye (2008) berargumen bahwa penting bagi negara untuk dapat menghasilkan *soft power* yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan negara, dimana diplomasi publik digolongkan sebagai salah satu media dalam menghasilkan *soft power* tersebut.

Keinginan untuk memiliki *soft power* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Nye (2008) yang menjelaskan bahwa *soft power* merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mendapatkan keinginannya dari negara lain, tanpa perasaan terpaksa dari negara tersebut. *Soft power* adalah kekuatan untuk menggerakkan pihak lain dengan memanfaatkan kesukarelaan dari pihak tersebut, sehingga dengan memiliki *soft power*, negara akan menghemat berbagai pengeluaran yang mereka alokasikan melalui tindakan koersif.

Terkait *soft power* ini, pemikir Diplomasi Publik dari Griffith University Australia yang bernama Ian Hall berargumen bahwa sedang terjadi “perlombaan” untuk menghasilkan *soft power* di Asia Timur (Hall, 2013). Dimana Negara-negara di Asia Timur berlomba-lomba untuk melaksanakan Diplomasi Publik untuk dapat menghasilkan pengaruhnya terhadap negara lain. Korea Selatan menunjukkan keseriusannya dalam pelaksanaan diplomasi publik melalui peningkatan anggaran untuk diplomasi publik dari tahun ke tahun, disamping menjadikan *Korean wave* yang merupakan fenomena fantastic dunia ini sebagai elemen penting dalam diplomasi publiknya (Trisni dkk, 2018). Selain itu, negara seperti Tiongkok terus konsisten dalam melaksanakan Diplomasi Publik yang lebih bersifat terpusat kepada pemerintah dengan massif nya perkembangan jumlah Chinese Cultural Center di berbagai negara saat ini (Snow, 2020). Selanjutnya

Jepang sama halnya dengan Korea Selatan juga berfokus pada penggunaan budaya populer dalam pelaksanaan Diplomasi Publiknya melalui anime dan manga (lihat misalnya Effendi, 2011). Tidak hanya Negara-negara Asia, Amerika Serikat juga merupakan contoh negara yang dari dulu hingga sekarang memberikan porsi perhatian yang besar terhadap diplomasi publiknya. Dikatakan bahwa *“America’s forefathers believed then that foreign public opinion was important and that American views are not always well understood”*(Rugh, 2014). Sehingga penting bagi Amerika Serikat untuk menjelaskan kebijakannya kepada publik asing agar tidak terjadi salah tafsir terhadap kebijakan tersebut yang salah satunya dilaksanakan melalui diplomasi publik.

Indonesia sendiri telah lama memberikan perhatian kepada pelaksanaan Diplomasi Publik; tercatat bahwa Direktorat Diplomasi Publik telah dibentuk semenjak tahun 2002 yang lalu. Sayangnya, literatur yang membahas mengenai diplomasi publik Indonesia ini masih belum banyak (Rachmawati, 2016). Tetapi di sisi lain, terdapat juga opini yang diberikan oleh Huijgh (2016) yang menyatakan bahwa diplomasi publik Indonesia sedang berada dalam kondisi stagnan. Ketika diplomasi publik Indonesia yang belum terlalu banyak dibahas ini dikatakan dalam kondisi stagnan dan ketika beberapa negara besar seperti dijelaskan sebelumnya memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan diplomasi publik, menarik untuk

mengetahui bagaimana sesungguhnya posisi diplomasi publik ini bagi Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini mencari tau posisi Diplomasi Publik dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan melakukan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan studi ini. Dokumen tersebut diantaranya adalah pidato awal tahun Menteri Luar Negeri Indonesia, pidato presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan, Laporan kinerja Direktorat Diplomasi Publik, Buku Diplomasi Publik : Catatan, Inspirasi dan Harapan yang ditulis oleh Diplomat Al Busyra Basnur, serta artikel terkait yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. Penelitian ini menganalisis posisi ini dengan belandaskan kepada konsepsi Diplomasi Publik yang telah diberikan oleh ahli, yang di jelaskan lebih lanjut pada bagian tinjauan konseptual di artikel ini. Berdasarkan pemahaman terhadap konsepsi Diplomasi Publik tersebut, artikel ini menganalisis apakah diplomasi publik menjadi fokus/instrumen yang diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dengan merujuk kepada dokumen-dokumen yang disebutkan diatas sebagai data untuk dianalisis.

Hasil

Diplomasi Publik: tinjauan konseptual

Diplomasi Publik merupakan konsep yang cukup baru dalam hubungan internasional. Sebagai konsep yang relatif muda, Diplomasi Publik masih mengalami banyak perdebatan konseptual. Bagian tinjauan konseptual ini tidak mencoba untuk masuk ke dalam perdebatan terkait konsepsi Diplomasi Publik, tetapi akan berupaya untuk memberikan penjelasan singkat mengenai diplomasi publik itu sendiri dan aktivitas-aktivitas yang digolongkan pada pelaksanaan diplomasi publik. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai definisi diplomasi publik dan aktivitas-aktivitas yang digolongkan sebagai pelaksanaan diplomasi publik, sehingga akan memudahkan untuk memahami artikel ini. Lebih lanjut, penjelasan ini juga akan memudahkan penulis ketika memberikan analisis dokumen terhadap literature-literatur yang penulis jadikan sebagai sumber data untuk penulisan artikel ini. Penjelasan mengenai konsep diplomasi publik akan dijelaskan selanjutnya setelah ini.

Diplomasi publik diklaim sebagai praktek yang sudah dilaksanakan sejak lama oleh negara-negara di dunia, Cull (2009) mencatat bahwa *term* ini sudah digunakan semenjak tahun 1800-an. Dapat diidentifikasi bahwa istilah ini digunakan dalam pemberitaan di London Times pada tahun 1856 dan pemberitaan di New York Times pada tahun 1871, walaupun pada waktu itu definisi diplomasi publik tidak sepenuhnya sama dengan definisi yang digunakan pada

saat ini (Cull, 2009). Popularitas istilah Diplomasi Publik paska perang dunia disinyalir dimunculkan pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion (Cull, 2009). Menurut Cull (2009), Gullion, yang merupakan mantan Diplomat Amerika Serikat yang kemudian menjabat menjadi Dekan pada Fletcher School of Diplomacy, Universitas Tuft mengeluarkan istilah ini untuk pertama kalinya pada *international information and cultural relations*. Di klaim bahwa sejak saat itu penggunaan istilah diplomasi publik lebih populer, menggantikan istilah propaganda yang digunakan untuk mendefinisikan kegiatan serupa sebelumnya. Karena *term propaganda* cenderung memiliki konotasi negatif, maka istilah diplomasi publik menjadi lebih mudah untuk diterima tanpa rasa curiga.

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli terkait Diplomasi Publik. Pada awal kelahirannya, diplomasi publik merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan negara (Tuch 1990, Feltcher School of Law and Diplomacy, Rana 2011). Seiring berkembangnya konsepsi diplomasi publik, definisinya berkembang menjadi lebih luas. Nicholas J. Cull, Professor dalam Diplomasi Publik menjelaskan bahwa Diplomasi Publik merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor internasional untuk mengelola lingkungan internasional melalui interaksi dengan publik internasional (Cull, 2009). Disini kata yang perlu digaris bawahi adalah publik

internasional. Dimana dapat diartikan lebih lanjut bahwa aktivitas ini bukanlah interaksi dengan pemerintah sebuah negara, melainkan interaksi ini dilakukan terhadap publiknya. Interaksi dengan publik asing inilah yang menjadi pembeda antara diplomasi publik dengan diplomasi tradisional, dimana diplomasi tradisional lebih menargetkan pemerintah sebuah negara (G to G). Selain itu, jika melihat pada definisi yang lain, Diplomasi publik didefinisikan sebagai:

Public diplomacy..... is an instrument used by states, associations of states, sub states and non-state actors to influence thought and mobilize actions to advance their interest and values abroad by informing and engaging publics, building and managing relationships, and developing an understanding of cultures, attitudes and behavior (d'Hooghe, 2015)

Definisi ini memperlihatkan pergeseran dari segi aktor yang melaksanakan diplomasi publik. Pada awalnya aktivitas Diplomasi Publik ini dikatakan dilaksanakan oleh negara, tetapi saat ini, aktor pelaksana diplomasi publik dapat beragam. Cull (2009) berargumen bahwa pada Diplomasi Publik yang baru ini, negara bukan lagi merupakan aktor tunggal dalam diplomasi publik; terdapat organisasi internasional, kelompok-kelompok yang ditunjuk oleh negara dan perusahaan transnasional yang dapat turut menjadi aktor pelaksana diplomasi publik. Sementara itu d'Hoonge (2015) menjelaskan bahwa aktor-aktor selain negara yang dapat terlibat dalam pelaksanaan

diplomasi publik saat ini dapat dikelompokkan kedalam lima grup yaitu : 1. Dunia akademis: akademisi dari universitas maupun sekolah, institusi riset, think tanks dan organisasi kesiswaan; 2. NGO dan grup-grup lobi pada level nasional maupun internasional; 3. Bisnis: perwakilan dari organisasi-organisasi bisnis, perusahaan-perusahaan besar dan kamar dagang; 4. Organisasi Kebudayaan seperti museum, galeri, teater, institusi kebudayaan, artis dan festival; 5. Warganegara: orang-orang yang terlibat dalam berbagai program pertukaran organisasi atau hal lainnya, diaspora, individual citizen.

Selanjutnya, Cull (2009) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan diplomasi publik pada era ini dipengaruhi oleh teknologi informasi, dimana internet telah menjelma menjadi media yang populer untuk digunakan dalam pelaksanaan diplomasi publik. Contoh nyata penggunaan internet yang sukses dapat dilihat pada *Korean wave* dimana pelaksanaannya sangat memanfaatkan teknologi internet (Trisni dkk, 2019), sehingga dapat menjangkau masyarakat dunia dengan mudah dan cepat. Selanjutnya jika berbicara mengenai pelaksanaan diplomasi publik saat ini, Cull (2009) mencatat bahwa pelaksanaannya lebih memperhatikan interaksi *people to peole* yaitu upaya agar terciptanya hubungan yang lebih baik antar masyarakat internasional dan menciptakan jaringan kerjasama yang lebih besar. Pada poin ini dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan diplomasi publik bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan atau memperbaiki

citra tertentu, tetapi lebih jauh pelaksanaan diplomasi publik juga dicita-citakan untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif yang dapat mencari peluang kerjasama melalui hubungan *people to people* antar negara. Sehingga secara tidak langsung interaksi ini dapat memberikan kebermanfaatan ekonomi.

Dari penjelasan diatas, terdapat poin-poin yang ingin penulis *highlight* yaitu; pelaksanaan diplomasi publik suatu negara bukan semata-mata pelaksanaan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung. Negara dikatakan memperhatikan keberadaan diplomasi publik jika pada aktivitasnya negara memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan klasik yang ingin dicapai dalam pelaksanaan diplomasi publik, seperti perbaikan/pembentukan citra tertentu untuk mencapai kepentingan negara; yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan perangkulan publik asing untuk menarik hatinya. Selain itu, hirauan terhadap diplomasi publik juga dapat dikatakan ada, ketika negara memperlihatkan kecenderungan untuk menjadi stimulator kegiatan diplomasi publik, sehingga dapat merangsang terbentuknya kerjasama. Stimulasi ini dapat dilakukan terhadap actor-aktor domestik yang telah dijelaskan sebagai aktor yang dapat melaksanakan diplomasi publik diatas. Penjelasan inilah yang akan penulis lihat lebih lanjut pada dokumen-dokumen yang penulis analisis.

Direktorat Diplomasi Publik

Berbicara mengenai Diplomasi Publik dan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Direktorat Diplomasi Publik pada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia. Direktorat Diplomasi Publik sendiri berdiri pada tahun 2002 yang lalu dibawah inisiasi Menlu Hassan Wirajuda (Basnur, 2018). Pada saat berdirinya, Direktorat ini lahir seiring dengan “Kebijakan Benah Diri” yang dikeluarkan oleh Menlu Wirajuda yang berfokus kepada tiga aspek utama yaitu: Restrukturisasi organisasi departemen, restrukturisasi perwakilan RI di luar negeri dan Pembenahan fungsi diplomat (Rachmawati, 2016). Menlu Wirajuda menjelaskan bahwa “Diplomasi Publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain” (Basnur, 2017).

Direktorat Diplomasi Publik sendiri diberikan amanat untuk “merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis” (Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016). Untuk menjalankan amanat yang

diberikan kepadanya, Direktorat Diplomasi Publik ini dibagi atas beberapa bagian yaitu: Subdirektorat Politik dan Keamanan; Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan; Subdirektorat Sosial dan Budaya; Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis; Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional (Website Kementerian Luar Negeri Indonesia). Direktorat Diplomasi Publik ini menjalankan berbagai program untuk mendekati publik di antaranya adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), *Out Standing Student to The World* (OSTW), *Diplomatic Tour*, Bali Democracy Forum (BDF), Interfaith Dialogues, Global Inter-Media Dialogues, Duta Belia, e-Diplomasi, Updates from the Regiona (UFTR), Presidential Friends of Indonesia (PFoI) dan Forum Komunikasi Kemlu dan Pemda (Basnur, 2017). Program-program ini belumlah merupakan semua program yang dilaksanakan oleh Dit. Dipliik, karena pada tahun 2015 dan 2016, terdapat 18 program yang dilaksanakan oleh direktorat ini (Laporan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik, 2018), dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sifatnya domestik melalui program-program yang mendekati masyarakat Indonesia dan yang sifatnya internasional, melalui berbagai program terhadap publik asing. Pelaksanaan aktivitas diplomasi publik dengan pendekatan intermestik ini memperkuat konsep Diplomasi Publik Indonesia yang

bersifat 2 arah, yaitu dilaksanakan untuk masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional (Tabloid Diplomasi, 2017).

Lebih lanjut jika berbicara mengenai peran yang dilaksanakan oleh Direktorat Diplomasi Publik dalam mendukung politik luar negeri, maka dapat dicatatkan bahwa peran ini antara lain adalah sebagai berikut; 1. Pemberdayaan kaum moderat Indonesia, 2. Memajukan *People to People contact*, 3. Diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, 4. Merangkul dan mempengaruhi publik dalam dan luar negeri, 5. Mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri (Rachmawati, 2016). Sementara itu citra yang ingin dibentuk melalui diplomasi publik ini adalah citra Indonesia yang demokratis, moderat dan progresif (Tablod Diplomasi, 2017). Untuk mencapai citra Indonesia yang demokratis ini, Kemlu berupaya untuk melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Adapun nilai demokrasi yang dimaksudkan disini bukanlah nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari demokrasi Barat, tetapi nilai demokrasi yang berakar dari nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh Indonesia (Tabloid Diplomasi, 2017).

Sementara itu, fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Diplomasi Publik menurut website Kementerian Luar Negeri meliputi pekerjaan yang kompleks, mulai dari perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan diplomasi publik, pelaksanaan kegiataannya,

menyiapkan berbagai hal terkait penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang diplomasi publik; menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan diplomasi publik; termasuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan diplomasi publik (website Kementerian Luar Negeri). Selain itu, terdapat sasaran strategis yang telah dirumuskan oleh Direktorat Diplomasi Publik dengan melibatkan *stake holders* yang diantaranya adalah ;1. Peran Indonesia yang berpengaruh dalam kerjasama internasional, 2. Meningkatkan citra Indonesia di dunia Internasional, dimana dengan adanya citra positif, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sehingga dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang positif 3. Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kuat (Laporan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik, 2018). Sasaran strategis ini dicoba untuk dicapai melalui berbagai program tahunan yang dilaksanakan oleh direktorat ini.

Dalam penyelenggaraan kegiatan diplomasi publik, Indonesia mencoba untuk memanfaatkan beberapa hal yang disebut sebagai asset-aset diplomasi publik Indonesia. Laporan kinerja Direktorat Diplomasi Publik tahun 2018 menyebutkan bahwa asset-aset yang dimaksud disini adalah Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang plurallis

dan toleran, Islam moderat dan keragaman budaya. Adapun aset Diplomasi Publik ini didefinisikan sebagai “hal-hal yang dimiliki Indonesia, *to win hearts and minds, domestically and internationally* (Laporan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik, 2018). Penjelasan dalam bagian ini, akan menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis pada sub bab selanjutnya terkait Indonesia dan Diplomasi Publik.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Direktorat Diplomasi Publik Indonesia secara organisasi telah memiliki struktur dengan pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana strategis, yaitu pelaksanaan diplomasi publik yang tidak hanya menjangkau masyarakat asing, seperti diplomasi publik yang kebanyakan dilaksanakan oleh Negara-negara di dunia, tetapi juga menjangkau masyarakat domestik. Dapat dilihat bahwa berbagai program seperti Forum Komunikasi Kemlu dan Pemda, merupakan kegiatan dengan sasaran kepada masyarakat domestik. Disini terlihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan *two level games* yang mana lingkungan domestik mempengaruhi perilaku di level internasional dan sebaliknya fenomena di level internasional akan memberikan dampak terhadap lingkungan domestik, dipraktekkan di Indonesia melalui pendekatan kepada kedua pihak yang memberikan pengaruh ini. Diplomasi publik Indonesia berupaya untuk menjangkau masyarakat domestik untuk mendapatkan dukungan dalam kebijakan luar negeri.

Selain itu, keberadaan Direktorat Diplomasi Publik merupakan sebuah fakta bahwa Diplomasi Publik menjadi hirauan khusus bagi Indonesia, sehingga Indonesia telah memiliki direktorat khusus yang menangani urusan ini.

Indonesia dan Diplomasi Publik

Diskusi mengenai Diplomasi Publik Indonesia merupakan diskusi yang menarik. Dalam konteks hari ini, kita melihat bahwa Negara-negara sedang berlomba untuk meningkatkan *soft power* nya, dimana diplomasi publik dianggap sebagai salah satu media yang dapat digunakan. Disisi lain, terdapat berbagai tantangan ketika membicarakan mengenai Diplomasi Publik, tantangan ini berkaitan erat dengan keilmuan diplomasi publik yang relatif masih baru, sehingga masih terdapat berbagai perdebatan konseptual maupun praktis terhadap keilmuan ini. Efek dari keilmuan yang muda ini juga berdampak kepada Indonesia, dimana literatur yang membahas mengenai diplomasi publik Indonesia sendiri belum begitu banyak, selayaknya literatur mengenai diplomasi konvensional yang cukup melimpah dan sudah mapan dari segi keilmuan. Alasan inilah yang membuat penulis merasa bahwa penelitian mengenai diplomasi publik Indonesia ini menarik untuk dilaksanakan.

Berbicara mengenai diplomasi publik Indonesia, tercatat bahwa Indonesia telah melaksanakan praktek diplomasi publik dalam waktu

yang cukup panjang. Menurut Al Busyra Basnur yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018, Indonesia telah lama melaksanakan diplomasi publik, bahkan sebelum direktoratnya terbentuk pada tahun 2002. Sebelumnya, pelaksanaan diplomasi publik dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui kerjasama dengan rekan kerja, baik yang berasal dari kalangan pemerintah ataupun non pemerintah (Basnur, 2018). Direktorat khusus terkait Diplomasi Publik ini kemudian dibentuk seiring dengan berkembangnya diplomasi yang meletakkan pentingnya pendekatan kepada aktor non-pemerintah karena peranan penting yang mereka miliki, sehingga pembentukan direktorat ini diharapkan dapat mempermudah Kemlu dalam mendekati publik dalam negeri ataupun luar negeri (Basnur, 2018). Artinya disini Direktorat Diplomasi Publik dibentuk untuk merespon perkembangan yang terjadi dan ini bukan mengindikasikan bahwa praktek diplomasi publik ini merupakan praktek yang baru bagi Indonesia.

Presiden Indonesia sendiri, terlihat memberikan perhatian terhadap praktek diplomasi publik ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama 10 tahun dari 2004-2014, dikenal sebagai merupakan presiden yang berkarakter internasionalis (Sambhi, 2013; Piccone & Yusman 2014; Conelly 2014; Septiari 2019), yang berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang

dikenal pada tingkat global. Sifat internasionalis ini terlihat melalui keaktifan Indonesia diberbagai forum internasional, termasuk menggagas Bali Democracy Forum (BDF) pada tahun 2007 yang lalu, yang sukses menarik partisipasi banyak negara di dunia. BDF terus menjadi agenda tahunan dari Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Indonesia hingga hari ini (Lihat Laporan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik, 2018). Selain itu, keaktifan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN ataupun bilateral (Trisni dkk, 2016) dapat dijadikan bukti karakter internasionalis yang dimiliki oleh SBY. Karakter *outward looking* memerlukan bangunan citra yang baik di level internasional. Presiden SBY kemudian mengeluarkan jargon *Thousand Friends Zero Enemy* yang memperlihatkan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan banyak negara dan mengelakkan sengketa dengan siapapun. Selain itu, Presiden SBY sendiri dalam berbagai pidatonya selalu mengemukakan citra Indonesia sebagai negara Islam yang cinta damai dan salah satu negara demokrasi terbesar dunia ; dimana Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan di Indonesia. Pada pidatonya juga, presiden SBY sering menjelaskan mengenai *people to people relation*, seperti misalnya pidato sambutan SBY pada tahun 2009 yang lalu (Sambutan Presiden pada Dialog Membangkitkan Memori Kolektif Kesejahteraan Antar Bangsa, 2016). Artinya disini, ketika hubungan *people to people*

adalah salah satu aktivitas yang dilaksanakan dalam diplomasi publik, maka dengan menyebutkan hal ini dalam pidato, terlihat bahwa aktivitas ini menjadi perhatian bagi Indonesia. Selain itu, BDF yang dilakukan dengan mengundang banyak negara merupakan wujud diplomasi publik untuk membangun citra Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintah Indonesia dari tahun 2014-saat ini, merupakan presiden yang memiliki karakter yang lebih *inward looking* (Conelly 2014; Situmorang 2015). Presiden Jokowi disinyalir memiliki ketertarikan yang lebih kecil terhadap kebijakan luar negeri (Nugroho, 2020) dan diplomasi jika dibandingkan dengan pendahulunya presiden SBY (Connelly, 2015). Walaupun demikian, beberapa fakta menunjukkan bahwa presiden Jokowi sebenarnya juga hirau terhadap pelaksanaan diplomasi publik. Penulis mencatat bahwa dalam beberapa pidatonya, presiden Jokowi mengisyaratkan hirauan terhadap diplomasi publik ini. Misalnya saja, pada tahun 2016 yang lalu, dalam keterangan persnya paska kunjungan kerja ke Jerman, Inggris, Belanda dan Belgia, Jokowi menyebutkan bahwa “..... apresiasi dan harapan yang tinggi terhadap peran Indonesia untuk perdamaian melalui pengembangan Islam yang moderat, yang demokratis, dan toleran. Saat ini, nilai Islam yang damai, yang demokratis, yang moderat, yang toleran telah menjadi aset diplomasi Indonesia di mata dunia”.

Penyampaian ini sejalan dengan penjelasan Direktorat Diplomasi Publik terkait citra Indonesia yang progresif, demokratis dan moderat. Dapat diartikan bahwa Jokowi sedang memperkuat bangunan citra yang dimiliki oleh Indonesia.

Tidak hanya itu saja, sekitar 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan November 2015 dalam sambutannya untuk menyambut presiden Finlandia, Jokowi menyampaikan bahwa “....*I believe that people-to-people relations become strong in international relationships. So, that is why we also need to promote people-to-people relations to cultural and tourism exchange between our two countries...*”. Jika kembali kepada definisi diplomasi publik secara konseptual, Cull (2008) seperti telah dikutip diatas menyatakan bahwa aktivitas diplomasi publik juga ditandai dengan meningkatkan aktivitas hubungan *people to people* yang bertujuan untuk meningkatkan peluang kerjasama. Sambutan Jokowi diatas menunjukkan bahwa sang presiden sedang mencoba untuk menstimulasi hubungan *people to people* ini, yang jika dikaitkan dengan bahasan diplomasi publik, maka upaya yang dilakukan Jokowi adalah upaya untuk menginisiasi pelaksanaan diplomasi publik. Pada dasarnya peningkatan hubungan *people to people* ini juga merupakan target yang ingin dilaksanakan oleh Direktorat Diplomasi Publik, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa presiden menaruh perhatian terhadap pelaksanaan diplomasi publik.

Sejalan dengan penjelasan diatas, pidato awal tahun Menlu Retno Marsudi dari tahun 2015-2020 juga selalu menyebutkan hal-hal yang terkait demokrasi ataupun Islam moderat. Contohnya saja, pada tahun 2015 yang lalu, Menlu Marsudi menyebutkan mengenai diplomasi Indonesia yang berkontribusi dalam pengembangan demokrasi dan upaya Indonesia dalam memperjuangkan saling pengertian dan *people to people contact* (Pidato awal tahun Menlu RI, 2015). Pada awal tahun 2016, Menlu Marsudi kembali menjelaskan mengenai Demokrasi dan kembali menyebutkan mengenai Bali Democracy Forum, sambil tidak lupa menjelaskan mengenai Islam yang damai (Pidato awal tahun Menlu RI, 2016). Penjelasan mengenai demokrasi dan BDF terus mengisi pidato awal tahun Menlu RI dari tahun 2017-2020 (Pidato awal tahun Menlu RI, 2017-2020). Disini terlihat konsistensi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam merupakan aset dalam diplomasi publik Indonesia. Perlu dicatat bahwa pidato kenegaraan biasanya selalu mencangkupi poin-poin yang dirasa penting oleh negara, sehingga dapat dikatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan poin penting yang merupakan kinerja dari Direktorat Diplomasi Publik. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa diplomasi publik merupakan instrumen yang penting bagi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik memiliki posisi spesial bagi Indonesia yang mana buktinya telah dapat dilihat mulai dari masa presiden SBY hingga presiden Jokowi saat ini. Indonesia terus melakukan aktivitas yang berkaitan dengan diplomasi publik dan memiliki alokasi dana untuk kegiatan tersebut. Disamping itu, direktorat yang dibentuk khusus untuk mengelola diplomasi publik juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk menciptakan citra Indonesia yang positif disamping menjalankan kegiatan-kegiatan stimulator, seperti BDF yang merupakan stimulasi untuk demokrasi, selain untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia. Sehingga, melalui penjelasan di atas dapat dinilai bahwa diplomasi publik menempati posisi yang spesial bagi Indonesia.

Kesimpulan

Pelaksanaan Diplomasi Publik semakin meningkat popularitasnya saat ini. Banyak negara yang memberikan perhatian istimewa dalam pelaksanaan diplomasi publiknya; negara—negara ini seperti Korea Selatan, Jepang, Cina dan Amerika Serikat. Pelaksanaan diplomasi publik sendiri lebih dipilih oleh negara karena aktivitasnya yang dirasa lebih minim resiko, tidak seperti pencapaian kepentingan negara dengan menggunakan kekerasan yang cenderung lebih mahal, karena banyak meminta alokasi dana. Selain itu, diplomasi publik juga populer terkait meningkatkan perhatian

terhadap *soft power*, dimana diplomasi publik dikatakan sebagai salah satu media untuk menghasilkan *soft power* ini. Indonesia sendiri telah lama melaksanakan diplomasi publik, seorang diplomat Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bahkan telah melaksanakan diplomasi publik sejak merdeka dulu. Akan tetapi, literature yang membahas mengenai diplomasi publik Indonesia baik secara konseptual maupun praktis terhitung masih sedikit, sehingga fakta inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini.

Secara ringkas, diplomasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menarik hati publik, yang bertujuan untuk mengambil *heart and minds* mereka, sehingga memudah pencapaian kepentingan negara. Dengan menggunakan studi literatur, penulis mencoba meneliti posisi diplomasi publik bagi Indonesia dengan cara meneliti beberapa dokumen yang memperlihatkan sikap Indonesia seperti artikel-artikel pada jurnal nasional dan internasional, serta pidato yang disampaikan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri. Melalui berbagai dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik memiliki posisi yang spesial bagi Indonesia, yang dapat dilihat dari pembahasan mengenai asset-aset diplomasi publik yang dijelaskan di atas pada berbagai pidato yang disampaikan oleh pejabat negara.

Daftar Pustaka

- Basnur, Al Busyra, *Diplomasi Publik: Catatan, Inspirasi dan Harapan*, Aswaja, 2018
- Basnur, Al Busyra, "Diplomasi Publik Indonesia Lahir Akibat Terjadinya Revolusi Teknologi Informasi", *Tabloid Diplomasi No. 104 tahun X*, April 2017
- Connelly, Aaron L, "Indonesian Foreign Policy under President Jokowi", *Lowy Institute*, 16 October 2014, view online 21 Maret 2020 <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesian-foreign-policy-under-president-jokowi>
- Connelly, Aaron L, "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges", *Contemporary Southeast Asia Vol.37, No.1, 2015*
- Cull, N. J., *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. California: FIGUEROA PRES, 2009 p.17
- Cull, N.J, "Public Diplomacy before Gullion the Evolution of a Phrase" dalam Nancy Snow dan P.M Taylor (eds) *Handbook of Public Diplomacy*, New York: Routledge
- D'Hoonge, Ingrid, *China's Public Diplomacy*, Brill, Netherland, 2015
- Effendi, Tony Dian, *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*, Galia Indonesia, 2011
- Fletcher school of Law and Diplomacy, "What is Diplomacy?", <http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy>
- Huijgh, Ellen, "The Public Diplomacy of Emerging Powers Part 2 : The Case of Indonesia", *CPD USC Center on Public Diplomacy at the Anneberg School*, FIGUEROA, 2016
- Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Direktur Direktorat Publik Diplomasi*" view online 5 April 2020, https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/86/direktur-diplomasi-publik
- Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Pascakunjungan Kerja Ke Jerman, Inggris, Belgia, Belanda, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 23 April 2016, view online 2 April 2020 https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_r_i_-

[_pasca kunjungan kerja ke jerman inggris jakarta 23 april 2016](#)

Laporan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018

Nye, "Public Diplomacy and Soft Power", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616, *PublicDiplomacy in a Changing World Mar.*, 2008, pp. 94-109, p.94

Nugroho, Johannes, "Is Jokowi's focus on domestic issues instead of foreign policy hurting Indonesia?" *Todayonline*, 20 February 2020, <https://www.todayonline.com/commentary/jokowis-focus-domestic-issues-instead-foreign-policy-hurting-indonesia>view online 12 Maret 2020

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pasal 592 huruf c

Piccone, Ted ; Yusman, Bimo, "Indonesian Foreign Policy : "A Million Friends and Zero Enemies", <https://www.brookings.edu/articles/indonesian-foreign-policy-a-million-friends-and-zero-enemies/>, view online 21 Maret 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2020 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdGFhbiUyMFBlcnMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMjAtJTlwSU5ELnBkZg==> , view online 1 April 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2019 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdGFhbiUyMFBlcnMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMTk1MjAtJTlwSU5ELnBkZg==>, view online 1 April 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2018 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdGFhbiUyMFBlcnMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMTgucGRm>, view online 1 April 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2017 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdGFhbiUyMFBlcnMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMTcucGRm>, view online 1 April 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2016
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybmlhdGFhbiUyMFBlenMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMTYucGRm>, view online 1 April 2020

Pidato awal tahun Menteri Luar Negeri RI tahun 2015
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybmlhdGFhbiUyMFBlenMI MjBUYWh1bmFuJTlwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMTUucGRm>, view online 1 April 2020

Rachmawati, Iva, *Diplomasi Publik: Meretas Jalan bagi Harmoni dalam Hubungan antar Negara*, Calpulis, 2016

Rana, Kishan, *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*, New York, 2011

Rugh, W. (2014), 'Front Line Public Diplomacy', Palgrave MacMillan

Sambhi, Natalie, "In his own words : Indonesia and SBY Speeches", *The Strategist*, 14 Juni 2013, view online 21 Maret 2020
<https://www.aspistrategist.org.au/in-his-own-words-indonesia-and-sbys-speeches/>

Sambutan Presiden RI pada Acara Dialog Membangkitkan Memori Kolektif Kesejahteraan antar Bangsa, 17 Maret 2009, view online, 21 Maret 2020
https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pada_dialog_membangkitkan_memori_kolektif_kesejahteraan_antar_bangsa_istana_nega

Sambutan Presiden Republik Indonesia Dan Presiden Finlandia State Dinner Untuk Menghormati Presiden Finlandia Istana Negara, Jakarta, 3 November 2015 view online 2 April 2020
https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_dan_presiden_finlandia_state_dinner_jakarta_3_november_2015

Septiari, Dian, "Foreign policy opens 2010s with idealism", closes with pragmatism

the Jakarta Post, 31 Desember 2019, view online 21 Maret 2020
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/31/foreign-policy-opens-2010s-with-idealism-closes-with-pragmatism.html>

Situmorang, Mangandar, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi—JK", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol.11, No.1, 2015

Snow, Nancy dan Taylor, Philip, "Preface and Introduction", Routledge Handbook of Public Diplomacy (ed), Routledge International Handbook, 2008

a. Snow, Nancy, "Public Diplomacy :New Dimension and Implications" in Snow and Cull *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, 2020

Tabloid Diplomasi, "Diplomasi Publik bukan Propaganda", *Tabloid Diplomasi No. 104 tahun X*, April 2017

Tabloid Diplomasi, "Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif Melalui Diplomasi Publik", *Tabloid Diplomasi No. 104 tahun X*, April 2017

Trisni, Sofia, Nasir, Putiviola Elian, Isnarti, Rika, Ferdian. "South Korean Government's Role in Public Diplomacy: A Case Study of the Korean Wave Boom". *Andalas Journal of International Relations Vol.8 No.1, 2019*

Trisni, Sofia, Isnarti, Rika, Sinulingga, Anita & Ferdian. "Pencapaian Kepentingan Korea Selatan melalui Diplomasi Publik Korean wave", *Jurnal Global dan Strategis no.12 no.2*, 2018

Trisni, Sofia, Apriwan & Irawan, Poppy, "Strategi Indonesia dalam merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Presiden SBY (Studi Kasus : Konflik Laut Tiongkok Selatan)", *Andalas Journal of International Studies, Vol 5. No.2* tahun 2016

Tuch, Hans, *Communicating with the World. US Public Diplomacy Overseas*, New York, 1990

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biografi

Sofia Trisni adalah seorang dosen pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Fokus risetnya adalah Diplomasi Publik.